

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PERBAIKAN KAMPUNG:  
KASUS KAMPUNG KOTA DI YOGYAKARTA**  
*(Community Respond to Kampung Improvement Activities:  
Case Urban Kampung in Yogyakarta)*

**Atyanto Dharoko**

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**Abstrak**

Kegiatan perbaikan kampung yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas lingkungan kampung kota dengan tujuan lebih lanjut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni. Pendekatan yang paling sepadan digunakan adalah metoda *community empowerment approach*.

Yogyakarta menjadi salah satu sasaran utama dari berbagai program perbaikan kampung karena memiliki masalah lingkungan yang cukup kompleks dengan adanya perkembangan kampung-kampung kumuh dan *illegal* yang tersebar di dalam wilayah kota. Perkembangan berbagai kegiatan perbaikan kampung selama ini menunjukkan hasil yang bervariasi karena dipengaruhi oleh kondisi kampung yang beraneka ragam serta pemahaman masyarakat yang berbeda-beda dalam melihat persoalan fenomena kampung mereka.

Penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat dalam satu wilayah kampung yang sama sangat bervariasi sehingga keberlanjutan dari berbagai program perbaikan kampung belum dapat dicapai. Pada kondisi pemahaman masyarakat yang rendah disebabkan karena pra kondisi yang dilakukan sangat kurang untuk memperoleh tingkat keberlanjutan yang tinggi, oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih baik oleh para inisiator pada masa pra kegiatan terutama dalam bentuk pemahaman masyarakat terhadap program dengan benar.

Kata kunci: sepadan, pemahaman, keberlanjutan

**Abstract**

*Kampung improvement activities developed by authority, community and sponsoring bodies are strategic effort to enhance environmental quality of the kampung and finally enhancing the community prosperity. The most compatible approach to develop is community empowerment basis.*

*Yogyakarta becomes one of the target since the city faces a complicated problems in environmental aspect. The improvement of kampung shows a various achievement because the awareness and concept of inhabitants are also varies.*

*It is concluded that different concept and interpretation among communities, authority and sponsoring bodies to understand the real problems of kampungs makes the participation of communities and sustainability become weaks. It is important for initiators understanding that pre conditioning becomes a key success for the programs.*

*Key words: compatible, awereness, sustainability*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu faktor pendorong meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dari sisi eksternal adalah berbagai kesempatan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik dibandingkan di perdesaan. Salah satu wujud nyata dalam kehidupan masyarakat urban adalah tumbuh serta berkembangnya perkampungan *slum*, *squatter* dan informal di perkotaan. Perkampungan kota tumbuh secara organik berdasarkan pada potensi dan permasalahan khas yang ada di dalam wilayah kampung.

Program perbaikan perkampungan kota mempunyai tujuan atau konsep untuk meningkatkan kualitas prasarana lingkungan dengan tujuan lanjut adalah akan memberi dampak pada peningkatan prasarana ekonomi dan kesehatan masyarakat. Disinilah arti strategisnya, namun tingkat keberhasilannya akan sangat tergantung pada pemahaman masyarakat dan cara implementasinya.

Konsep perbaikan kampung kota adalah *community based empowerment*, oleh sebab itu keberhasilannya sangat tergantung dari tingkat keterlibatan dan pemahaman masyarakat (Altman, 1993). Dengan demikian periode pasca huni yaitu pengembangan oleh masyarakat sendiri menjadi sangat penting agar terjadi *sustainability* pembangunan lingkungan kampung selanjutnya oleh masyarakat sendiri.

Kota Yogyakarta berkembang dengan pesat selama dekade terakhir ini. Perkampungan di pusat kota mengalami proses pemadatan baik fisik maupun kegiatannya, sedangkan dari perluasan kota ditandai dengan pertumbuhan perkampungan di pinggir kota (Pemda, 1998). Salah satu penggerak permbangunan perkampungan kota adalah program perbaikan kampung di Yogyakarta yang membangun berbagai komponen terutama infrastruktur.

Salah satu aspek penting untuk dilakukan penelitian adalah mengetahui seperti apa pemahaman penghuni kampung terhadap berbagai upaya perbaikan kampung selama ini dan seperti apa partisipasi penghuni dalam

kegiatan perbaikan kampung. Menurut Lucy (1986), keberlajutan perbaikan permukiman sangat ditentukan oleh faktor pemahaman dan seberapa partisipasi penghuni dalam kegiatan pengembangan permukiman.

## II. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pola pemahaman masyarakat terhadap program perbaikan kampung yang dilakukan selama periode 1995-2005.
2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat terhadap program perbaikan kampung yang dilakukan selama periode 1995-2005
3. Untuk mengetahui tingkat keberlanjutan yang dilakukan oleh masyarakat

## III. TINJAUAN PUSTAKA

Payne (1984) menyebutkan bahwa hubungan desa dengan kota dapat dijelaskan dalam konstelasi hubungan struktur *core* (perkotaan) dengan *periphery* (perdesaan) dalam bentuk mobilitas *raw materials*, produksi manufaktur, migrasi/*commuting saving* dan *wages* serta tenaga kerja. Dengan mobilitas tersebut maka terbentuklah hubungan saling tergantung dan saling mengisi antara perdesaan dan perkotaan.

Secara garis besar kampung kota dapat digolongkan atas dasar lokasi dan perkembangannya, sebagai berikut (Dharoko. A, 1998).

1. *Urbanized* kampung, yaitu kampung kota yang berada di pusat kota dan biasanya memiliki ciri kepadatan penduduk yang tinggi, kualitas infrastruktur lingkungan yang rendah dan kadang-kadang statusnya *illegal*.
2. *Semi urbanized* kampung, yaitu kampung yang berada di pinggir kota.

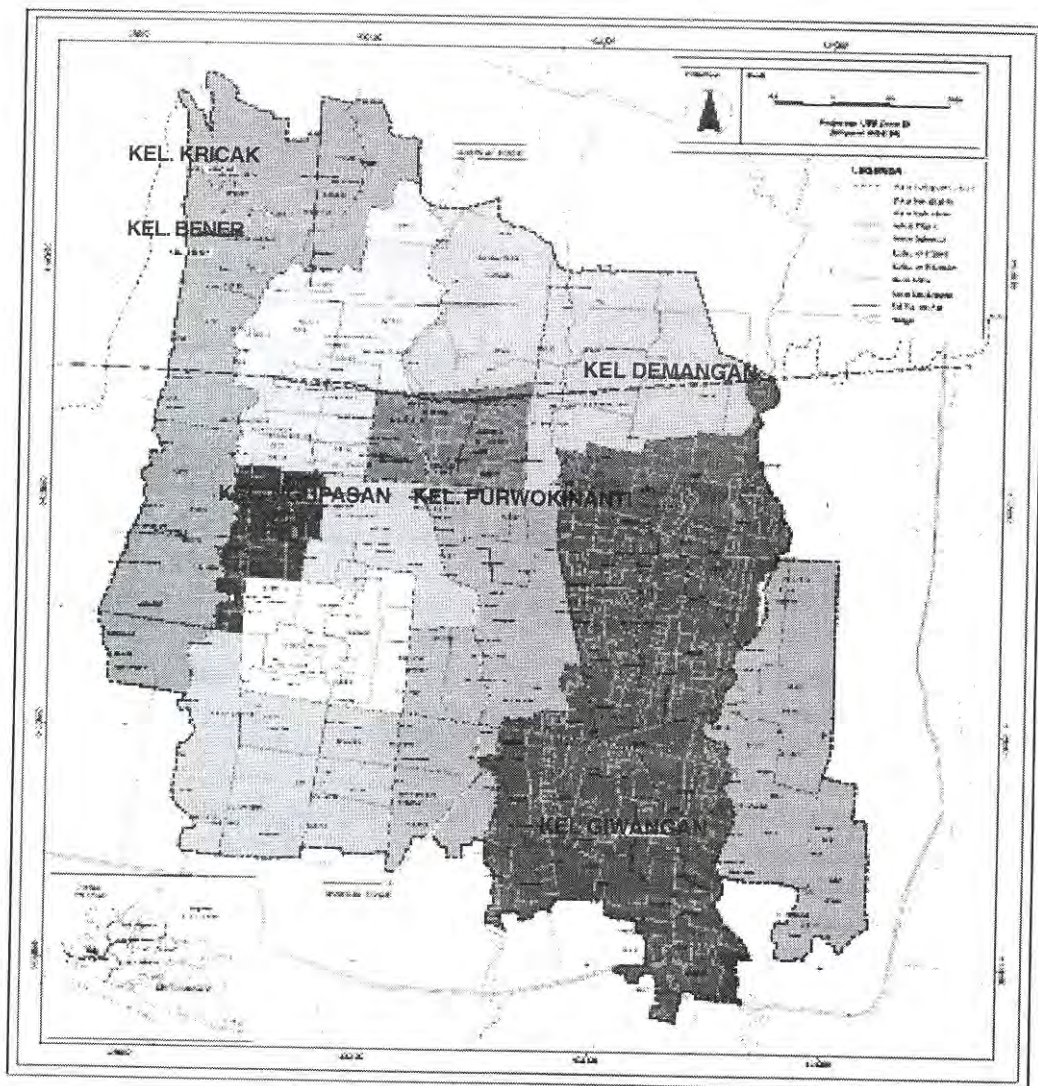
Ciri-ciri kampung seperti itu juga ditekankan oleh Herlianto (1981) yang lebih menekankan fokus pada rendahnya kualitas fasilitas infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

Masyarakat kampung kota menggambarkan masyarakat transisi dari rural ke urban, dari pertanian ke spesialis, dari tradisional ke modern dan dari gotong-royong ke hubungan formal (Choguill, 1997)). Namun secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kerjasama masyarakat kampung kota masih sangat tinggi dan kondisi ini menjadi modal yang sangat potensial untuk upaya pengembangan kampung kota.

Dengan demikian *community based empowerment* pada hakekatnya adalah pembangunan yang berpihak pada masyarakat termasuk dalam *decision making* sehingga sangat cocok dengan ciri-ciri masyarakat

kampung kota. Mair, L (1994) lebih menekankan *empowerment* pada pengertian keterlibatan langsung masyarakat (*participation*) dalam menangani masalah-masalah lokal sehingga pemahaman dan *share* merupakan dua hal yang sangat penting untuk menciptakan *sustainability* dan kemandirian.

Disisi lain, Brookfied (1994) menyatakan dalam bukunya berjudul *Interdependent Development*, bahwa respon memiliki unsur pokok *understanding*, *awareness*, *share* dan *participation*. Oleh karena itu dapat diambil pengertian bahwa respon masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hunian dapat dilihat dari dinamika pemahaman (*awareness*) dan



Gambar 1. Peta Wilayah Penelitian

partisipasi (*participation*) mereka, dan kesemua itu berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan oleh mereka sendiri.

#### IV. METODOLOGI

##### A. Wilayah Penelitian

Atas dasar asumsi bahwa karakter fisik dan sosial-ekonomi suatu kampung sangat berperan dalam menunjang keberhasilan upaya-upaya perbaikan kampung, maka wilayah penelitian dikelompokkan ke dalam 2 kelompok kelurahan atas dasar lokasinya terhadap pusat kota (gambar 1) yaitu:

1. Kelurahan yang berada di pusat kota, terdiri atas:
  - a. Purwokinanti
  - b. Ngupasan
  - c. Demangan
2. Kelurahan yang berada di pinggir kota, terdiri atas:
  - a. Kricak
  - b. Bener
  - c. Giwangan

Kelurahan tersebut telah memperoleh berbagai bentuk program perbaikan kampung cukup intensif antara tahun 1995-2002, dengan demikian dampaknya sudah dapat diidentifikasi saat ini.

##### B. Metode Penelitian

Penelitian ini ingin mengetahui beberapa sifat khas penghuni kampung kota yang dilihat dari beberapa aspek, namun ingin mengetahui keutuhan (*wholeness*) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Melihat konsep tersebut maka penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus (Vredendregt 1980). Lebih lanjut dikatakan salah satu ciri metode Studi Kasus adalah menggunakan tabulasi silang (*cross tabulation*) untuk meng-hubungkan sejumlah variabel untuk mencari keutuhan.

##### C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data berbasis data sekunder diperoleh dari survei instansi kecamatan dan

kelurahan, sedangkan data primer diperoleh dari penyebaran angket kepada masyarakat secara *purposive* dan pengamatan langsung di wilayah penelitian. Angket terdiri atas pertanyaan tertutup maupun terbuka, sebanyak 20 orang setiap kelurahan yang diwakili oleh aparat kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat.

##### D. Aspek Respon Masyarakat

Untuk meneliti fenomena masyarakat dalam menjawab tujuan penelitian maka, digunakan indikator sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kegiatan perbaikan kampung mereka.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan kampung.
3. Tingkat relevansi komponen program dengan kebutuhan riil versi masyarakat.
4. Tingkat kemampuan masyarakat untuk mengelola fasilitas infrastruktur yang ada.

#### V. HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Kependudukan

Jumlah penduduk di kelurahan wilayah penelitian bervariasi antara 4000 s/d 14.000 jiwa dengan kepadatan penduduk berkisar antara 36-319 jiwa/ha. Variasi yang ada menggambarkan bahwa penduduk pusat kota lebih banyak dan lebih padat dibandingkan perkampungan pinggir kota. Mata pencaharian penduduk semua wilayah penelitian juga bervariasi terdiri atas PNS, ABRI, swasta, pedagang, petani, jasa dan pensiunan.

Kondisi penduduk tersebut menggambarkan keadaan sosial, ekonomi dan fisik wilayah penelitian bervariasi. Hal tersebut sangat potensial membentuk pola pikir masyarakat yang berbeda-beda terhadap pemahaman arti rumah dan lingkungan perumahan mereka. Latar belakang dan pengalaman selalu menentukan konsep dan pola berpikir masyarakat yang berbeda-beda terhadap pemahaman arti rumah dan lingkungan perumahan mereka. Latar belakang dan pengalaman pada umumnya

selalu menentukan konsep dan pola berpikir masyarakat untuk merespon sesuatu yang terjadi di sekitar mereka (Carter 1981).

Dengan demikian menjadi jelas bahwa perbedaan lingkungan fisik, latar belakang dan pengalaman suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola berpikir dan akhirnya respon yang berbeda-beda masyarakat satu dengan lainnya. Untuk itu bahasan berikutnya akan merumuskan perbedaan-perbedaan tersebut.

## 2. Pemahaman Masyarakat

Dari hasil angket diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap program-program perbaikan kampung masih terbatas pada perbaikan fisik infrastruktur lingkungan dan belum pada tujuan lebih lanjut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu sebesar 61,2% (Tabel 1). Pemahaman seperti itu dipengaruhi oleh berbagai bentuk penyuluhan

yang lebih dipahami oleh masyarakat (sebesar 59%) menekankan pada substansi kegiatan fisik (Tabel 2).

Masyarakat kampung pinggir kota sebesar 54,6% lebih memahami bahwa perbaikan kampung lebih memiliki tujuan kesejahteraan dibandingkan dengan masyarakat kampung kota. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat kampung pinggir kota (51,6%) berpartisipasi lebih ke aspek non materi sehingga rasa keterlibatannya lebih besar (Tabel 3).

## 3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat pada tahap awal yaitu pada tahap penyuluhan dan perencanaan cukup besar, demikian pula pada tahap pelaksanaan. Ada perbedaan berarti pada partisipasi penduduk kelurahan pusat kota yang cenderung berpartisipasi dalam bentuk menyediakan konsumsi sementara penduduk

**Tabel 1. Pemahaman Masyarakat terhadap Program Perbaikan Kampung**

No	Kelurahan	Pemahaman (% responden)		
		Meningkatkan kesejahteraan	Perbaikan lingkungan	Membangun fasilitas baru
1	Purwokinanti	20	70	10
2	Ngupasan	6	63	31
3	Demangan	18	82	-
4	Kricak	63	37	-
5	Bener	34	63	-
6	Giwangan	36	54	-

Sumber: Hasil angket 2003

**Tabel 2. Kegiatan Penyuluhan**

No	Kelurahan	Substansi Penyuluhan(% responden)		
		Penjelasan fisik	Penjelasan Kegiatan ekonomi	Kurang memahami
1	Purwokinanti	46	27	27
2	Ngupasan	73	9	18
3	Demangan	50	26	24
4	Kricak	36	18	46
5	Bener	56	11	33
6	Giwangan	82	-	18

Sumber: Hasil angket 2003

kampung pinggir kota lebih cenderung diwujudkan dalam bentuk non material yaitu tenaga (Tabel 3):

Fakta tersebut sesuai dengan karakteristik masyarakat kampung kota yang lebih bercirikan masyarakat urban yang telah dipengaruhi kehidupan *patembayan*. Sementara itu masyarakat kampung pinggir kota lebih bercirikan kehidupan paguyuban perdesaan (Keller 1984). Dengan demikian partisipasi masyarakat kampung kota dalam bentuk material bangunan dan konsumsi tampak lebih formal dibanding masyarakat pinggir kota yang cenderung berpartisipasi dalam bentuk tenaga atau menurut istilah mereka sebagai partisipasi langsung.

Selain partisipasi menonjol dalam bentuk tenaga dan konsumsi, sumbangan dalam bentuk material bangunan juga cukup besar seperti di kelurahan Demangan dan Giwangan. Hal tersebut menggambarkan komitmen masyarakat yang besar walaupun pemahaman tentang perbaikan kampung sangat bervariasi.

#### 4. Relevansi terhadap Kebutuhan Riil Masyarakat

Relevansi yang dimaksud adalah kesesuaian antara komponen yang dibangun oleh program-program perbaikan kampung dengan kebutuhan nyata masyarakat. Program-program pada umumnya membangun komponen jalan lingkungan, sanitasi, kemudian

**Tabel 3. Bentuk Partisipasi Masyarakat**

No	Kelurahan	Bentuk Partisipasi (% responden)				
		Tenaga	Material	Konsumsi	Pengawasan	Lain-lain
1	Purwokinanti	26	9	42	9	14
2	Ngupasan	25	-	50	-	24
3	Demangan	37	27	17	-	20
4	Kricak	48	14	38	-	-
5	Bener	56	8	26	10	-
6	Giwangan	41	22	19	-	18

Sumber: Hasil angket 2003

**Tabel 4. Perbandingan Komponen yang Dibangun dengan Harapan Masyarakat**

No	Kelurahan	Jenis Komponen (% responden)									
		Jalan		Sanitasi		Sampah		Air Bersih		Drainase	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	Purwokinanti	50	-	22	20	11	-	11	20	5	60
2	Ngupasan	47	-	20	-	33	-	-	-	-	-
3	Demangan	78	-	11	-	11	25	-	75	-	-
4	Kricak	54	4	46	-	-	-	-	96	-	-
5	Bener	46	33	23	-	8	67	8	-	15	-
6	Giwangan	47	-	21	-	16	-	11	-	5	-

Sumber: Hasil angket 2003

Keterangan: A = informasi responden tentang komponen dibangun  
B = ekspresi responden tentang kebutuhan riil

**Tabel 5. Iuran Wajib untuk Pengelolaan Infrastruktur**

No	Kelurahan	Iuran Wajib untuk Pengelolaan (% responden)	
		Ada	Tidak Ada
1	Purwokinanti	94	6
2	Ngupasan	86	14
3	Demangan	64	36
4	Kricak	34	66
5	Bener	27	63
6	Giwangan	64	36

Sumber: Hasil angket 2003

fasilitas persampahan. Namun pernyataan responden tentang komponen program yang diharapkan atau dianggap lebih sesuai menghasilkan informasi yang berbeda sebagaimana terbaca pada Tabel 4.

Dari hasil angket pada Tabel 4 tergambar bahwa relevansi yang paling rendah justru berada pada kelurahan-kelurahan pusat kota. Hal tersebut terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap konsep perbaikan kampung masih terbatas sehingga merumuskan kebutuhan pun juga belum komprehensif.

##### 5. Tingkat Kemampuan untuk Mengelola Lebih Lanjut

Aspek *sustainability* dalam program perbaikan kampung mengandung pengertian bahwa masyarakat mempunyai kemampuan dan kesadaran untuk memelihara infrastruktur lingkungan kampung. Tanpa ditunjang dengan kesadaran dan kemampuan ekonomi, sulit diharapkan masyarakat mampu memelihara infrastruktur dengan baik.

Hasil jejak pendapat tergambar bahwa sebagian responden mengelola dengan sistem iuran wajib secara rutin, namun sebagian keberatan dengan iuran wajib dan sebagian lagi berpendapat bahwa iuran wajib tidak dikelola dengan baik oleh pengelola (Tabel 5). Tampak bahwa penduduk kampung pusat kota lebih memilih bentuk partisipasi formal dalam bentuk iuran wajib (sebesar 81%) untuk biaya pemeliharaan lingkungan dibandingkan dengan bentuk lainnya. Penduduk perkampungan

pinggir kota tidak melakukan iuran wajib (sebesar 55%) dan lebih memilih mengerjakannya secara bersama-sama atau bergiliran. Dengan sistem yang berbeda tersebut tampak bahwa proses berkelanjutan untuk memelihara fasilitas lingkungan setelah program perbaikan kampung dapat terjadi namun dengan cara yang berbeda.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat kampung kota yang diteliti terhadap maksud dan tujuan perbaikan kampung berbeda antara pusat kota dan pinggir kota. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan pemahaman tersebut membentuk ekspresi prioritas dan kebutuhan riil yang berbeda antar kampung yang diteliti dan antara penduduk dengan penyandang program (Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah).

Partisipasi penduduk kampung pusat kota cenderung berbeda dengan pinggir kota. Penduduk pusat kota cenderung berpartisipasi dalam bentuk konsumsi (material) sementara penduduk pinggir kota cenderung dalam bentuk tenaga (non-material).

Tingkat keberlanjutan yang dilihat dari sistem iuran wajib yang dikelola masyarakat kampung yang diteliti tergambar moderat yaitu 62%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tingkat

keberlanjutan (*sustainability*) dapat terjadi namun masih diperlukan dorongan terus menerus dari pemerintah maupun sponsor.

## 2. Saran

Potensi masyarakat kampung yang diteliti untuk memelihara infrastruktur cukup tinggi, oleh karena itu yang diperlukan lebih lanjut adalah memberikan knowledge kepada mereka tentang pentingnya memiliki lingkungan permukiman yang sehat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan diterbitkannya artikel ini, dengan tulus diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, redaktur Jurnal Manusia dan Lingkungan, dan semua pihak atas kesediaannya untuk memberikan masukan dan mengoreksi naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dharoko. A (1998). *Kampung Kota: Suatu Freed yang Dinamis*. Seminar Perkotaan. Universitas Diponegoro.
- Herlianto (1981). *Program Perbaikan Kampung*. Direktorat Perumahan. Bandung.
- Mair. L (1994). *Anthropology and Development*. Mac Millan Education Ltd. London.
- Payne. G (1984). *Low-Income Housing in the Developing World: The Role of Site and Services and Settlement Up Grading*. Jon Willey & Sons Ltd.
- Choguill. C (1997). *New Communities for Urban Squatters*. Plenum Press. New York.